

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki individu dalam memahami isu politik. Individu yang aktif dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara memiliki kecenderungan literasi politik yang baik (Heryanto, 2021). Informasi politik yang diterima dan dapat dipahami oleh individu dapat memengaruhi pada partisipasi politik, proses pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah (Putra et al., 2025). Masyarakat dengan literasi politik yang memadai dapat mendorong perubahan sosial dengan arah pada peningkatan kesejahteraan karena dapat menjalankan hak dan kewajiban warga negara. Untuk dapat meningkatkan literasi politik masyarakat, diperlukan strategi literasi politik berupa sosialisasi, program pendidikan politik yang diawasi oleh profesional, dan pelibatan mahasiswa sebagai agen literasi di tengah masyarakat (Darajat & Muhtadi, 2020).

Pembentukan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi didukung oleh peran literasi politik, sebab literasi politik mendorong keterbukaan berpikir kritis. Literasi politik dibangun melalui pengalaman sehari-hari yang berkembang sehingga individu dapat memahami dan menilai suatu isu politik. Kemampuan tersebut terlihat ketika individu dapat memahami perbedaan pandangan, menyadari dampak suatu isu, serta mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan politik yang diambil.

Kemudian, sikap politik individu juga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut, sehingga dari nilai tersebut mendorong individu terhadap keterbukaan berpikir kritis, penghargaan terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap nilai keadilan dan toleransi (Crick, 2000). Manifestasi nyata dari kemampuan literasi politik individu terlihat ketika individu berada dalam diskusi publik, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah (Fischer et al., 2021 ; Heryanto, 2021; Karolčík et al., 2025).

Demokrasi yang telah lama berkembang dan tampak stabil dihadapkan dengan tantangan potensi penurunan kualitas. Kondisi tersebut menuntut warga negara memiliki kesempatan memahami persoalan publik dan berpartisipasi dalam proses politik secara efektif. Dalam kriteria ideal proses demokrasi milik Dahl salah satunya mengenai pemahaman tercerahkan menekankan pentingnya kesempatan bagi warga negara memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan publik beserta konsekuensinya (Dahl, 1998). Kemudian, dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan pembentukan warga negara yang demokratis, kritis, dan partisipatif melalui pengembangan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan (Adnan, 2005). Maka, literasi politik memiliki keterkaitan dengan kualitas demokrasi karena warga negara memahami isu publik, evaluasi kebijakan pemerintah, dan partisipasi dalam proses politik secara rasional dan

bertanggung jawab, serta merupakan bagian dari pembentukan warga negara dalam Pendidikan kewarganegaraan.

Sejalan dengan hal tersebut, kondisi demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya kecenderungan kemunduran. Kemunduran tersebut ditandai dengan pembatasan kebebasan berekspresi serta praktik pelanggaran dalam kehidupan politik (Dori et al., 2025). Hasil riset *The Economist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2024 berada pada skor 6,44 yang mengindikasikan penurunan kualitas demokrasi (Girsang, 2025). Kondisi tersebut memicu berbagai respons publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Respons tersebut diwujudkan melalui kritik, saran, serta penyampaian aspirasi sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Rasji et al., 2024).

Suatu sistem sosial yang terbentuk atas dasar ketergantungan antar individu untuk mencapai tujuan bersama dapat disebut sebagai organisasi (Lestari et al., 2024). Organisasi dalam perguruan tinggi terwujud dalam bentuk organisasi mahasiswa, organisasi mahasiswa yang menjadi wadah untuk pengembangan keterampilan, keterlibatan sosial, dan pengalaman akademik serta non akademik mahasiswa (Pratama et al., 2024). Dalam organisasi mahasiswa, aktivitas organisasi berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dan representasi kepentingan mahasiswa (Sulastris & Utami, 2020). Peran organisasi mahasiswa adalah membangun kesadaran

berdemokrasi, membentuk sikap kritis, dan mendorong partisipasi politik mahasiswa (Alifiyah & A'yun, 2024).

Mahasiswa memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai agen perubahan moral, sosial, dan etika. Mahasiswa dituntut untuk bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk peran kontrol sosial dari mahasiswa kepada pemerintah (Syafudin et al., 2022 ; Sustiyoso et al., 2022). Peran tersebut menjadikan mahasiswa tidak hanya sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dalam struktur organisasi mahasiswa yang disebut sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), menempati posisi strategis sebagai representasi aspirasi mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki potensi pemahaman dan sikap politik pengurus terhadap isu politik dengan pengalaman berorganisasi (Rahmawati, 2022; Alifiyah & A'yun, 2024).

Belakangan terjadi fenomena kemunduran gerakan mahasiswa terhadap peran dalam politik di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang berubah menjadi industri sehingga mahasiswa didorong untuk lebih cepat lulus, sehingga berdampak pada melemahnya kultur akademis berupa kritis, dialogis, berdaya dan lain-lain. Selain itu, terjadi kamufase identitas pada gerakan mahasiswa, dengan melakukan peniruan aktivis mahasiswa akan tetapi tidak disertai dengan pengetahuan terhadap tuntutan yang dilakukan dalam gerakan mahasiswa. Lebih lanjut, kamufase

identitas menjadi pemenuhan gaya hidup atau *lifestyle* di media sosial yang menjadikan makna dan tujuan gerakan mahasiswa berbeda dengan tujuan awal (Sair, 2016 ; Ibrahim & Nur, 2023).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024. Program ini dirancang sebagai upaya peningkatan kualitas gizi, khususnya anak usia sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari aspek anggaran, transparansi, hingga kualitas implementasi yang dinilai belum optimal. Penempatan anggaran program dalam anggaran pendidikan memunculkan perdebatan karena dinilai akan memengaruhi alokasi *mandatory spending* 20 persen untuk sektor pendidikan. Selain itu, program ini juga disoroti memiliki potensi dalam menghadapi konflik kepentingan, patronase, dan praktik kronisme, berhubungan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan aktor politik tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan indikasi bahwa implementasi program berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen konsolidasi politik (Anggraeni et al., 2025 ; BBC News Indonesia, 2026).

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu isu publik yang memantik respons kritis mahasiswa. Tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dalam aksi “Indonesia Gelap” menyoroti implikasi program tersebut terhadap sektor pendidikan (Shabrina, 2025).

Berbagai persoalan dalam pelaksanaan program berupa aspek anggaran hingga tantangan implementasi lapangan muncul sehingga menjadi perdebatan publik. Di sisi lain, kehadiran program ini membentuk peran sekolah yang tidak hanya sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan peserta didik (Albaburrahim et al., 2025). Kondisi tersebut memunculkan berbagai sikap dan respons, khususnya mahasiswa sebagai kelompok sosial yang kritis terhadap isu politik. Oleh karena itu, literasi politik mahasiswa menjadi penting untuk memahami bagaimana menyikapi dan merespons isu Makan Bergizi Gratis dalam ruang demokrasi (Makmur & Samsudin, 2022; (Pricilia & Aliyyah, 2024).

Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan penggunaan anggaran negara. Sebagai kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah, Makan Bergizi Gratis mencerminkan arah dan pilihan pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan publik. Literasi politik berperan dalam hal ini sebab menentukan kemampuan individu untuk memperoleh informasi, memahami tujuan kebijakan secara kritis. Mahasiswa dengan literasi politik akan memiliki pandangan dan pemaknaan terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, respons mahasiswa terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis dapat menjadi gambaran mengenai literasi politik dalam memahami dan menyikapi suatu kebijakan publik.

Penelitian “Transformasi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa FIS Unimed”

menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana mahasiswa dalam memahami dan mengekspresikan pandangan politik. Selain itu, mahasiswa merupakan agen perubahan dan memiliki peran penting dalam mengontrol aliran informasi, apabila terjadi kekeliruan maka diperlukan peran aktif dalam partisipasi politik (Wahab & Halking, 2025). Sementara itu, penelitian “Peranan Organisasi Kemahasiswaan sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik” menekankan peran organisasi mahasiswa sebagai pendorong kesadaran dan partisipasi politik (Rahmawati, 2022). Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada media sosial dan organisasi mahasiswa sebagai sarana pendidikan politik secara umum. Penelitian ini berupaya menggali pemahaman literasi politik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan pengalaman mereka dalam menyikapi isu politik.

Kehadiran organisasi mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki peran sebagai representasi suara mahasiswa sekaligus aktor intelektual dalam kehidupan kampus. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi pihak yang menyampaikan pandangan dan respons terhadap isu politik yang terjadi. Respons yang ditunjukkan oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa terhadap isu politik mencerminkan literasi politik yang dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman literasi politik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa penting untuk diteliti guna melihat peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial dijalankan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini melibatkan mahasiswa

sebagai informan pembandingan guna melihat persamaan dan perbedaan pemahaman serta respons terhadap kebijakan publik, khususnya Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman literasi politik dan sikap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan mahasiswa memahami dan merespons kebijakan publik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pemahaman dan respons mahasiswa terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini memiliki relevansi dengan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji aspek pengetahuan kewarganegaraan yang tercermin dalam pemahaman dan respons terhadap kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai peran mahasiswa sebagai warga negara dalam kehidupan demokratis melalui kajian literasi politik terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini berangkat dari posisi mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan warga negara yang memiliki peran dalam menyampaikan respons terhadap isu politik. Peran tersebut menuntut literasi politik yang memadai dalam membentuk pemahaman dan sikap mahasiswa. Akan tetapi, sikap dan

respons yang ditunjukkan tidak selalu mencerminkan pemahaman literasi politik yang komprehensif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman organisasi, arus informasi, serta dinamika sosial dan politik yang berkembang. Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah memunculkan berbagai pandangan dan respons dari mahasiswa, termasuk pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan mahasiswa. Penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pemahaman literasi politik dan respons mahasiswa dan posisi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai representasi mahasiswa dalam menyikapi kebijakan tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji pemahaman literasi politik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan dalam merespons isu Makan Bergizi Gratis.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini dirumuskan ke dalam fokus dan subfokus guna memperjelas arah dan kedalaman penelitian. Adapun fokus dan subfokus penelitian, sebagai berikut.

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada literasi politik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta periode 2026-2027 dalam menyikapi kebijakan Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini juga melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai informan pembanding untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemahaman dan respons mahasiswa terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut tidak

dikaji dari sisi efektivitas kebijakan, melainkan digunakan sebagai konteks untuk memahami literasi politik mahasiswa dalam memahami dan merespons kebijakan publik.

2. Subfokus Penelitian

Untuk memperdalam fokus penelitian, terdapat subfokus penelitian sebagai berikut.

- a. Pemahaman literasi politik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan mahasiswa dalam menyikapi kebijakan Makan Bergizi Gratis.
- b. Sikap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan mahasiswa terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis.
- c. Respons pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sebagai wujud literasi politik dalam menyikapi isu Makan Bergizi Gratis.

D. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman literasi politik pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis?
2. Bagaimana sikap dan respons pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam menyikapi kebijakan Makan Bergizi Gratis?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teori dan manfaat praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian literasi politik, khususnya memahami mengenai pemahaman literasi politik mahasiswa terhadap kebijakan publik. Penelitian ini menambah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap pengetahuan kewarganegaraan dengan isu kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya literasi politik bagi organisasi mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa dalam membentuk sikap dan respons terhadap isu politik.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman literasi politik dan membangun sikap kritis terhadap isu politik yang berkembang di masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

